



# Policy Brief

VOLUME 7 No. 13 TAHUN 2013

## Melestarikan Lanskap Hutan Sumbawa melalui Penguatan Kelompok Tani Madu Hutan

Oleh: Retno Maryani<sup>1</sup>, Iis Alviya, Virni Budiarifanti, Mimi Salmiah

Penulis dan tim bekerja sebagai peneliti pada Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.  
Email penulis [retnomaryani@hotmail.com](mailto:retnomaryani@hotmail.com)

### Permasalahan

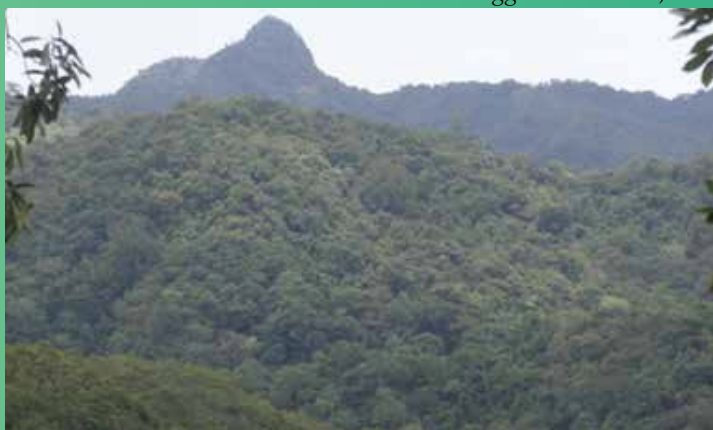
Nama Sumbawa identik dengan madu hutan, cairan penjaga kesehatan yang berkhasiat tinggi ini dihasilkan dari belantara rimba yang saat ini terancam kelestariannya. Madu hutan dihasilkan dari sejenis pohon lokal yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan *boan*, tempat bersarangnya *Apis dorsata* yang menyediakan nektar bagi lebah hutan. Pohon *boan* tersebar di lereng pegunungan dan di lokasi tertentu ditemukan di lembah, sepanjang sungai dan anak sungai atau riparian. Bersama dengan antara lain kelompok pohon asam, kemiri serta pulai dan kesambi, pohon *boan* membentuk lanskap hutan, yang menutupi kawasan lindung di Kabupaten Sumbawa seluas 45%. Keberadaan lanskap hutan diperlukan untuk menjaga sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, serta

menjamin kelangsungan usaha madu hutan bagi penduduk setempat.

Pulau Sumbawa secara umum termasuk di dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat yang dibagi menjadi empat wilayah administrasi kabupaten, yaitu Sumbawa Barat, Sumbawa Besar/Sumbawa, Dompu dan Bima, serta kotamadya Bima. Kabupaten Sumbawa dikelilingi oleh pulau-pulau kecil berpenduduk; seperti Pulau Moyo, Pulau Medang, Pulau Tapan, Pulau Bungin, Pulau Kaung dan Pulau Panjang.

Dalam konteks percepatan pembangunan ekonomi nasional (MP3EI), Sumbawa tergolong dalam koridor lima yang diproyeksikan sebagai andalan pengembangan pariwisata, perikanan dan peternakan. Tantangan untuk mewujudkan proyeksi pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan melestarikan lanskap di sepanjang wilayah pantai hingga dataran tinggi pulau Sumbawa.

Madu hutan Sumbawa sebagian besar berasal dari hutan lindung yang menurut Julmansyah (2010) dapat dikategorikan mengikuti tipologi tertentu. Kelompok hutan ini merupakan penghasil utama madu hutan yang merupakan ikon perdagangan antar pulau, antar daerah bahkan antar kampung. Bagi masyarakat setempat, madu merupakan salah satu sumber pendapatan dari hutan disamping produk susu kuda liar, kopi, serta biji kemiri yang menjadi andalan setempat.





Usaha madu hutan yang dikelola melalui suatu jaringan pemasaran melibatkan 265 kepala keluarga yang tersebar di sembilan desa wilayah Kabupaten Sumbawa (Julmansyah 2010). Diluar jaringan ini, masih banyak petani madu hutan yang mengembangkan usaha dan memasarkan produknya secara mandiri. Usaha madu hutan perlu lebih ditata dan kelembagaannya diorganisir untuk menghasilkan kualitas madu yang memenuhi standar persyaratan tertentu serta menjamin kelestarian pohon *boan* yang menjadi sumber penghasil madu hutan.

**Tabel 1.** *Tipologi Hutan dan Potensi Madu di Kabupaten Sumbawa (Julmansyah 2010)*

Tipologi Hutan	Status dan Fungsi Hutan	Taksiran Potensi Madu
Hutan asosiasi tanaman tertentu	Hutan lindung	Sumber madu dengan potensi tinggi
Hutan tropik lembab	Hutan lindung	
Hutan riparian	Hutan lindung dan hutan produksi	
Hutan berduri	Hutan lindung dan hutan produksi	Sumber madu dengan potensi rendah
Hutan tropik kering	Hutan produksi	
Hutan mangrove	Hutan di luar kawasan	

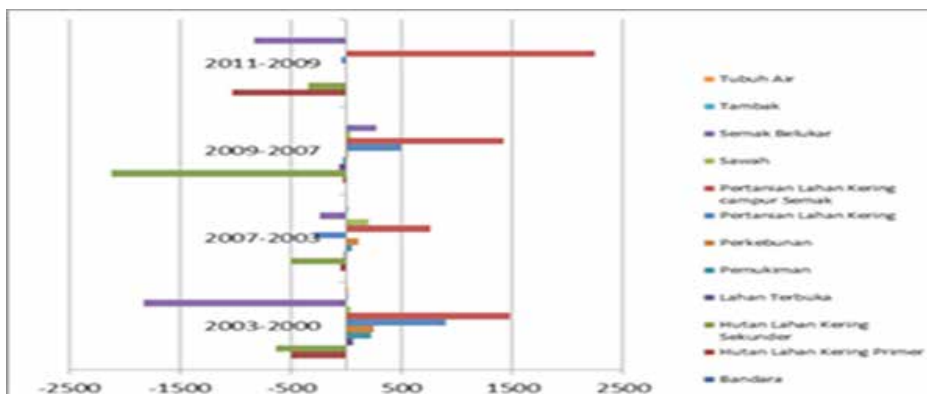
## Perubahan Lanskap Hutan di Kabupaten Sumbawa

Secara teoritis, kesehatan dan kelestarian hutan merupakan prasyarat bagi usaha madu hutan yang berkesinambungan. Fakta di lapangan menunjukkan terjadinya kerusakan lanskap hutan yang mengancam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2002 melaporkan kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa mendekati luas 4000 hektar. Laju kerusakan yang terjadi di tingkat wilayah didorong oleh maraknya aktivitas pertambangan, pertumbuhan penduduk serta pembangunan ekonomi melalui konversi lahan hutan. Hasil penelitian Tim PUSPIJAK tahun 2012 menunjukkan luas hutan primer dan sekunder semakin menurun, sedangkan lahan pemukiman, pertanian lahan kering dan perkebunan meningkat secara signifikan.

Perubahan struktur lanskap hutan yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 digambarkan dalam diagram di bawah ini. Secara signifikan, pengurangan hutan lahan kering terjadi pada kurun waktu 2000-2003 dan 2009 – 2011. Menurunnya luas tutupan hutan diiringi dengan meningkatnya pertanian lahan kering dan semak belukar, serta meningkatnya luas tanah kosong.

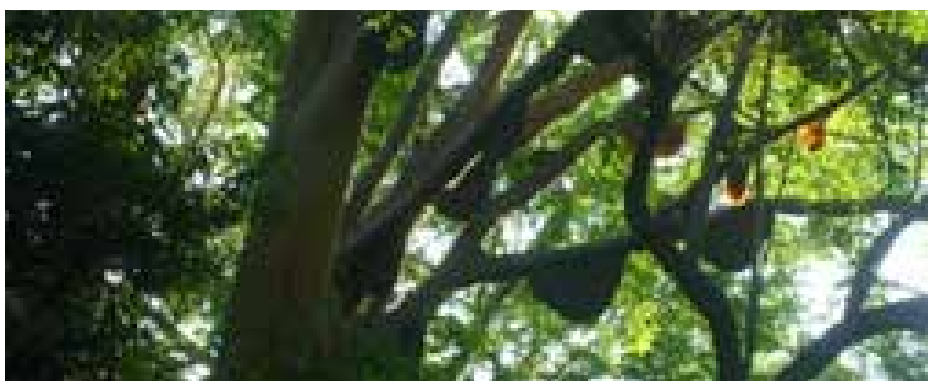
Perubahan lanskap yang terjadi dipandang sudah mengancam kelestarian lingkungan di pulau Sumbawa, untuk itu Pemerintah Daerah memandang perlunya meningkatkan tutupan vegetasi hutan, yang terutama diperlukan untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor.





Rencana peningkatan luas hutan tersebut disampaikan melalui Surat Gubernur No.522/265/Plan/Dishut/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Revisi Peta Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan. Upaya untuk merevitalisasi kondisi hutan ini sekaligus merupakan peluang untuk memperkuat kelembagaan usaha madu hutan yang menjadi ikon

perdagangan antar pulau dan juga dari kampung ke kampung. Pengaturan usaha madu hutan terbatas pada pemasaran produk dan belum mengatur penguasaan *boan* dan pemanfaatannya secara lestari. Pengaturan ini penting mengingat pohon *boan* merupakan komponen penyusun lanskap hutan yang keberadaannya diperlukan secara ekologis, ekonomis maupun sosial.



### Penguatan Kelembagaan Usaha Madu untuk Melestarikan Lanskap Hutan

Lanskap hutan di Kabupaten Sumbawa perlu dilestarikan mengingat fungsinya sebagai pengatur ketersediaan air, pencegah erosi dan bahaya banjir, serta penjamin keberlangsungan usaha madu hutan. Upaya untuk melestarikan lanskap hutan dapat dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan usaha madu hutan. Secara teoritis, kelembagaan memuat aturan main penggunaan sumberdaya alam, dengan cara mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam memanfaatkan sumberdaya serta mengontrolnya melalui sanksi dan penalti (Ostrom 1990).

Di Kabupaten Sumbawa, contoh sukses kelembagaan usaha madu hutan terdapat di Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh yang berada di daerah pegunungan dan dapat dicapai sekitar dua jam dari ibukota Kabupaten di Sumbawa Besar. Penduduk desa

Batudulang sebagian besar memiliki mata pencaharian berkebudan dan pencari madu di hutan. Hampir seluruh petani madu hutan di wilayah tersebut tergabung dalam koperasi hutan lestari yang berafiliasi dengan jaringan madu hutan Sumbawa (JMHS). Petani madu didorong untuk membentuk kelompok dan memasarkan produknya melalui jaringan.

Kelompok petani difasilitasi dengan akses penguasaan terhadap pohon *boan* tertentu, yang jumlahnya sudah diinventarisasi serta posisinya telah dipetakan. Kelompok ini juga bertanggungjawab melestarikan keberadaan *boan* tersebut, termasuk menciptakan kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pohon *boan* untuk menghasilkan nektar bagi produksi madu hutan. Usaha madu hutan menuntut produksi yang higienis dan lestari, dengan kadar air tertentu yang memenuhi persyaratan pasar.

PUSPIJAK berperan dalam meningkatkan kapasitas lembaga dengan menyelenggarakan pelatihan untuk memperkuat kelompok tani usaha madu hutan. Badan Litbang Kehutanan melalui UPTnya yang berada di ibukota NTB, Mataram, memperkuat kapasitas petani melalui penyediaan sarana untuk produksi madu secara higienis, bantuan alat pengukur kadar gula dan rumah madu untuk menurunkan kadar air. Pihak Pemerintah Daerah melalui UPTD

KPH Batulanteh memfasilitasi agar usaha madu yang dilakukan petani dengan melestarikan pohon dan lanskap hutan di daerah ini memperoleh pengakuan global melalui pemberian insentif cadangan karbon yang dihasilkan melalui upaya melestarikan lanskap hutan di Sumbawa. Dengan adanya lembaga usaha madu hutan yang mantap, terbukti lanskap hutan dapat dijaga kelestariannya dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

## Rekomendasi

Keberhasilan lembaga usaha madu hutan dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian lanskap hutan masih terbatas di desa Batudulang. Di desa-desa lain, usaha madu hutan masih dilakukan secara individual, belum terorganisir pemasaran produknya dan penguasaan pohon *boan* masih belum jelas aturannya sehingga mengancam kelestarian pohon serta lanskap hutan di wilayah Sumbawa. Pelatihan yang dilakukan PUSPIJAK mengindikasikan adanya permintaan dari lokasi penghasil madu di desa lain untuk difasilitasi membangun kelompok dan mengembangkan jejaring usahanya. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan oleh Kementerian Kehutanan untuk

bersama-sama dengan Pemerintah Daerah merevitalisasi kondisi hutan Sumbawa yang terdegradasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mensinergikan program rehabilitasi lahan dengan usaha madu hutan, antara lain melalui pemilihan dan penanaman jenis yang menghasilkan pakan lebah
2. Memfasilitasi pembentukan kelompok tani usaha madu hutan dan memperkuat kapasitas kelompok melalui pelatihan dan pengembangan jejaring usaha.
3. Mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah / Perda untuk mencegah penebangan pohon penghasil madu dan memberikan insentif bagi kelompok tani yang menjaga keberadaan madu hutan

## Rujukan/ Referensi

Julmansyah 2010. *Madu Hutan Menekan Deforestasi. Jalan Lain Konservasi DAS dan Adaptasi Perubahan Iklim.* Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS). Pondok Madu Rakyat Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh.

Maryani, dkk 2012. *Pelatihan Usaha Kelompok Tani Hutan. Pengembangan Pola Kemitraan Masyarakat Desa Hutan Mendukung Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan.* Laporan Internal Proyek PKPP, Kerjasama Kemen RISTEK bersama Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar 29-31 Mei 2012

\_\_\_\_\_. *Pengembangan Pola Kemitraan Masyarakat Desa Hutan Mendukung Strategi Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan.* Laporan Internal Proyek PKPP, Kerjasama Kemen RISTEK bersama Kementerian Kehutanan.

\_\_\_\_\_. *Kajian Lanskap Hutan di DAS Kritis dan Non Kritis.* Laporan internal Hasil Penelitian PUSPIJAK 2012.



Kementerian Kehutanan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan**

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor  
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;  
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org